



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
<i>ASBTRACT</i>	xviii
INTISARI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	17
F. Cara Penelitian.....	18
1. Bahan/Materi Penelitian.....	19
2. Data Penelitian.....	20
3. Alat Pengumpulan Data.....	23
4. Cara Pengumpulan Data.....	26
5. Analisis Data.....	26
6. Penarikan Kesimpulan.....	28
G. Sistematika Disertasi.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	33
1. Pembagian Wilayah, dan Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah.....	34
2. Otonomi Daerah sebagai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	40
3. Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.....	44
B. Rasionalitas Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris di Indonesia.....	48
1. Dasar Pengaturan Keberadaan Desentralisasi Asimetris.....	49
2. Dasar-dasar Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris.....	54



C.	Praktik Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris	57
1.	Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	58
2.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	64
3.	Daerah Provinsi Aceh	72
4.	Daerah Provinsi di Papua	79
BAB III	LANDASAN TEORI	87
A.	Teori Negara Kesatuan	87
B.	Teori Pemerintahan Daerah	96
C.	Teori Desentralisasi Asimetris	103
D.	Teori <i>Constitutional Deferral</i>	107
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	111
A.	Konstitusionalitas Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ..	111
1.	Konteks Pemindahan Ibu Kota Negara	113
2.	Polemik Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.....	118
3.	Pengaturan Kekhususan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.....	121
3.1.	Status Keberadaan Kelembagaan Daerah IKN	124
3.2.	Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Daerah IKN.....	127
3.3.	Fungsi dan Peran Otorita Ibu Kota Nusantara.....	130
3.4.	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara	132
3.5.	Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah IKN, dan Jaminan Partisipasi Masyarakat	133
3.6.	Kedudukan, Pengisian, dan Masa Jabatan Kepala, dan Wakil Kepala OIKN.....	135
3.7.	Pengawasan, Pemantauan dan Peninjauan oleh DPR	137
3.8.	Pembentukan Peraturan Kepala OIKN.....	138
3.9.	Pemilihan Umum Tingkat Nasional	142
3.10.	Cakupan & Pembagian Wilayah.....	145
3.11.	Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	148
4.	Analisis Kesesuaian Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terhadap Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945	152
4.1.	Pasal 18.....	153
4.1.1.	Pembagian Wilayah NKRI menjadi Daerah- Daerah Provinsi	154
4.1.2.	Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan	163
4.1.3.	DPRD dan Keanggotaan melalui Pemilihan Umum ..	166



4.1.4. Kepala Pemerintahan Daerah yang Dipilih	
secara Demokratis	170
4.1.5. Otonomi Seluas-luasnya	174
4.1.6. Hak Menetapkan Peraturan Daerah	178
4.2. Pasal 18A	184
4.2.1. Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	185
4.2.2. Hubungan Keuangan, Pelayanan Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Lainnya	193
4.3. Pasal 18B	209
4.3.1. Pemaknaan Daerah Istimewa dalam UUD 1945 Naskah Asli	211
4.3.2. Pemaknaan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa dalam UUD 1945 Perubahan	221
4.3.3. Relevansi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus	234
4.4. Rasionalitas Kesesuaian Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terhadap Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945	239
4.4.1. Klasterisasi Analisis Kesesuaian Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara	241
4.4.2. Pola Hubungan antara Pasal 18 dengan Pasal 18A dan Pasal 18B	245
4.4.3. Alternatif Ideal Pengaturan Kesesuaian Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara	256
B. Implikasi Hukum Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	265
1. Implikasi terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris di Indonesia	265
1.1. Rekonseptualisasi Pemaknaan Daerah Khusus	270
1.2. Format Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris	279
2. Implikasi Pembentukan Ibu Kota Nusantara terhadap Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	285
2.1. Ibu Kota Nusantara sebagai Variabel Baru Daerah “Pusat Pemerintahan Negara” Pengganti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	285
2.2. Pembentukan Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global	291



3.	Implikasi terhadap Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	295
3.1.	Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan yang Bersifat Khusus, dan sekaligus Urusan Pemerintahan Pusat Non-Absolut	296
3.2.	Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bagian Integral Pemerintah Pusat.....	314
4.	Implikasi terhadap Pembagian Wilayah, dan Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah NKRI	319
4.1.	Keberadaan Daerah Setingkat Provinsi sebagai Variabel Baru Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan	319
4.2.	Keberadaan Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Tunggal (<i>Single Executive</i>) Ibu Kota Nusantara sebagai Variabel Baru Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah ..	324
BAB V	PENUTUP	331
A.	Kesimpulan.....	331
B.	Saran	331
DAFTAR PUSTAKA	335
INDEKS ISTILAH	348
INDEKS SUBYEK	351
GLOSARIUM	352



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keaslian Penelitian	12
Tabel 1.2.	Pemetaan Kebutuhan Data Penelitian.....	24
Tabel 4.1.	Peraturan Kepala OIKN yang telah Diundangkan.....	141
Tabel 4.2.	Risalah Pembahasan Pasal 18 UUD 1945 terkait Daerah Provinsi	157
Tabel 4.3.	Pandangan Mini Fraksi DPR dan Komite I DPD terhadap Keberadaan Otorita dan/atau Kepala Otorita dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.....	172
Tabel 4.4.	Pembahasan mengenai Daerah Istimewa dalam Persidangan BPUPKI dan PPKI.....	211
Tabel 4.5.	Sampel Pembahasan mengenai Daerah Khusus atau Daerah Istimewa dalam Persidangan Badan Pekerja MPR RI.....	223
Tabel 4.6.	Pandangan Mini Fraksi DPR dan Komite I DPD terhadap Pengaturan IKN sebagai suatu Daerah Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.....	235
Tabel 4.7.	Rangkuman Hasil Analisis Kesesuaian Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terhadap Ketentuan Pemerintahan Daerah UUD 1945	241
Tabel 4.8.	Status/Bentuk Kelembagaan Daerah yang Bersifat Khusus (Daerah Khusus) atau Bersifat Istimewa (Daerah Istimewa)	267
Tabel 4.9.	Undang-Undang Daerah Khusus atau Daerah Istimewa sebagai Peraturan Pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945	280
Tabel 4.10.	Perbandingan Format Kekhususan Ibu Kota Nusantara dengan Ibu Kota Jakarta	285
Tabel 4.11.	Konseptualisasi Karakteristik IKN sebagai Daerah Administratif	288
Tabel 4.12.	Perbandingan Urusan Pemerintahan Khusus OIKN dengan Urusan Pemerintahan Konkuren.....	301
Tabel 4.13.	Perbandingan Sub Urusan Pemerintahan Khusus OIKN dengan Sub Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	303
Tabel 4.14.	Perbandingan Sub Urusan Pemerintahan Khusus OIKN dengan Sub Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	305
Tabel 4.15.	Kewenangan Lain di luar Kewenangan Khusus OIKN	314



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.	Peta Jalan Penelitian	9
Bagan 2. 1.	Kerangka Pikir Penelitian	85
Bagan 4.1.	Konseptualisasi Pembagian Cakupan Wilayah IKN.....	147
Bagan 4.2.	Pembagian Satuan Wilayah Administratif IKN	148
Bagan 4.3.	Konseptualisasi Klaster Kesesuaian Pengaturan Daerah Khusus Ibu Kota Negara terhadap Ketentuan Pemerintahan Daerah UUD 1945	244
Bagan 4.4.	Rekonseptualisasi Pemaknaan Daerah Khusus.....	273
Bagan 4.5.	Konseptualisasi Kedudukan OIKN dalam Lingkup Pemerintahan Eksekutif	307
Bagan 4.6.	Konseptualisasi Struktur Pemerintahan Daerah Tunggal IKN	325
Bagan 4.7.	Struktur Organisasi OIKN	327